

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang masalah

Desentralisasi fiskal merupakan kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas pelayanannya untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari tingkat provinsi sampai desa. Pemerintahan Indonesia yang semula bersifat sentralistik diubah sistemnya menjadi desentralistik karena pada prinsipnya pemerintah daerah yang lebih mengerti kondisi masyarakat yang ada didaerahnya (Huda, 2012). Menurut Undang-Undang No 32 tahun 2004, adanya desentralisasi fiskal dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas.

Pemerintah daerah lebih mengetahui preferensi, kebutuhan masyarakat, sehingga biaya penyediaan barang dan jasa publik diserahkan kepada pemerintah daerah. sama halnya pemerintah kabupaten/kota dan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi, maka akan lebih efektif dan efisien apabila penyediaan tersebut Untuk penyediaan jasa dan barang publik ini diperlukan sumber fiskal yang memadai. Selain dana transfer dari pemerintah pusat , dengan adanya desentralisasi, maka setiap daerah dapat lebih memanfaatkan potensi daerahnya masing masing sebagai sumber pendanaan dalam pembangunan. Sehingga daerah diarahkan untuk secermat mungkin dalam penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya untuk daerah yang tidak kaya sehingga dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat (Ahmad, 2007 : 24) Pemerintah pusat memberikan berbagai

kewenangan kepada daerah melalui mekanisme desentralisasi dan dekonsentrasi. Desentralisasi memberikan kewenangan otonomi kepada daerah untuk mengurus urusan pemerintahan, sementara dekonsentrasi melimpahkan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada daerah meliputi:

1. Urusan pemerintahan daerah: Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik.
2. Pengelolaan keuangan daerah: Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola keuangan daerah, termasuk pemungutan pajak dan retribusi, serta mengelola pendapatan daerah lainnya.
3. Pengelolaan sumber daya manusia: Daerah memiliki kewenangan untuk mengelola
4. sumber daya manusia di daerahnya, termasuk dalam hal pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan pegawai.
5. Pengawasan: Pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Desentralisasi fiskal, yang berarti pelimpahan kewenangan pengelolaan keuangan dari pemerintah pusat ke daerah, memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya meliputi peningkatan efisiensi layanan publik, percepatan pembangunan, dan partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam pengambilan keputusan. Namun, desentralisasi fiskal juga dapat menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan ketimpangan antar daerah dan potensi masalah dalam pengelolaan keuangan daerah.

a. Dampak Positif:

1. Peningkatan Efisiensi Layanan Publik:Pemerintah daerah, dengan pengetahuan lokal mereka, dapat lebih memahami kebutuhan masyarakat dan mengalokasikan anggaran secara lebih efektif untuk layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
2. Percepatan Pembangunan:Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk lebih mandiri dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal, sehingga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi.
3. Partisipasi Masyarakat yang Lebih Besar:Desentralisasi fiskal mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, seperti melalui forum Musrenbang, sehingga pembangunan lebih sesuai dengan aspirasi masyarakat.
4. Pengembangan Potensi Daerah:Daerah dapat lebih fokus pada pengembangan potensi ekonomi dan sumber daya lokal, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Dampak Negatif:

1. Peningkatan Ketimpangan Antar Daerah:Daerah yang memiliki sumber daya dan potensi lebih besar cenderung mendapatkan keuntungan lebih besar dari desentralisasi fiskal, sementara daerah tertinggal mungkin kesulitan mengejar ketertinggalan.
2. Potensi Masalah Pengelolaan Keuangan Daerah:Pemerintah daerah mungkin menghadapi tantangan dalam pengelolaan keuangan, seperti kurangnya kapasitas sumber daya manusia dan potensi penyalahgunaan wewenang.

3. Kesenjangan Akses Layanan Publik: Meskipun tujuan desentralisasi adalah pemerataan, kesenjangan akses layanan publik, terutama di daerah tertinggal, masih menjadi masalah.
4. Konflik Kepentingan: Desentralisasi fiskal dapat menimbulkan konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah, atau antar daerah itu sendiri, terkait alokasi sumber daya dan kebijakan.

Desentralisasi fiskal memiliki potensi besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pembangunan daerah. Namun, keberhasilan desentralisasi fiskal juga bergantung pada upaya pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi tantangan dan memastikan pengelolaan keuangan yang efektif serta pemerataan pembangunan.

Secara teori, pertumbuhan ekonomi merujuk pada peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian dalam jangka panjang, yang diukur melalui peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau pendapatan nasional. Menurut Adam Smith, (2013: 56-57)

Berikut beberapa poin penting terkait pertumbuhan ekonomi secara teori:

Faktor-faktor penentu:

Teori-teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan berbagai faktor yang mempengaruhi pertumbuhan, seperti akumulasi modal, peningkatan sumber daya manusia (tenaga kerja), kemajuan teknologi, dan inovasi.

1. Proses pertumbuhan: Pertumbuhan ekonomi adalah proses dinamis yang melibatkan interaksi berbagai faktor dan sektor dalam perekonomian.
2. Pengukuran: Pertumbuhan ekonomi biasanya diukur dengan peningkatan PDB riil

(yaitu, PDB yang telah disesuaikan dengan inflasi) atau pendapatan per kapita.

3. Implikasi: Pertumbuhan ekonomi yang positif memiliki implikasi penting bagi kesejahteraan masyarakat, seperti peningkatan pendapatan, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan standar hidup.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan, tujuan yang paling penting dari suatu pembangunan adalah pengurangan tingkat kemiskinan, dengan demikian membuat tingginya pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi akan dihitung dari berbagai aspek, baik dari sektor riil maupun sektor keuangan, baik dari produksi, konsumsi atau investasi.

Pembangunan ekonomi di suatu daerah pada hakekatnya merupakan rangkaian kegiatan yang secara sadar dan terus menerus dilakukan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik dan berkesinambungan. Tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah adalah pertumbuhan ekonomi yang menunjukkan dampak nyata dari kebijakan pembangunan tersebut.

Pertumbuhan ekonomi memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya termasuk peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan standar hidup. Namun, pertumbuhan ekonomi juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti peningkatan kesenjangan sosial, degradasi lingkungan, dan eksploitasi sumber daya alam.

a. Dampak Positif:

1. Peningkatan Pendapatan: Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan pendapatan per kapita dan pendapatan nasional secara keseluruhan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Penciptaan Lapangan Kerja: Pertumbuhan ekonomi seringkali disertai dengan ekspansi bisnis dan investasi, yang dapat menciptakan lebih banyak lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
3. Peningkatan Standar Hidup: Dengan meningkatnya pendapatan dan lapangan kerja, masyarakat dapat menikmati peningkatan standar hidup, termasuk akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, dan barang-barang konsumsi.
4. Peningkatan Daya Saing: Pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan daya saing suatu negara dalam perekonomian global, menarik investasi asing, dan mendorong inovasi.
5. Peningkatan Kemampuan Membiayai Pembangunan: Pertumbuhan ekonomi yang baik dapat meningkatkan pendapatan pemerintah, yang memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan sektor lainnya.

b. Dampak Negatif:

1. Kesenjangan Sosial: Pertumbuhan ekonomi tidak selalu merata, dan seringkali kesenjangan pendapatan antara kaya dan miskin semakin lebar.
2. Degradasi Lingkungan: Pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat menyebabkan eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, polusi, dan kerusakan lingkungan.

3. Eksploitasi Sumber Daya Alam: Pertumbuhan industri dan ekonomi seringkali membutuhkan sumber daya alam yang besar, yang dapat menyebabkan eksploitasi berlebihan dan kelangkaan sumber daya di masa depan.
4. Perubahan Gaya Hidup dan Ancaman Budaya: Pertumbuhan ekonomi dapat menyebabkan perubahan gaya hidup masyarakat, yang mungkin mengancam nilai-nilai budaya dan tradisi lokal.
5. Ketergantungan pada Sektor Industri: Terkadang, pertumbuhan ekonomi yang terlalu fokus pada sektor industri tertentu dapat menciptakan ketergantungan ekonomi dan kerentanan terhadap fluktuasi pasar.

Pertumbuhan ekonomi penting bagi kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) karena dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dalam hal pendidikan, kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pertumbuhan ekonomi diukur dari tingkat pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) untuk lingkup nasional dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) untuk lingkup wilayah. Selain dipengaruhi faktor internal, pertumbuhan ekonomi suatu negara juga dipengaruhi faktor eksternal, terutama setelah era ekonomi yang semakin mengglobal. Secara internal, tiga komponen utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi tersebut adalah pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Perekonomian Kabupaten Timor Tengah Selatan masih bergantung pada sektor pertanian, kehutanan, dan beberapa sektor lainnya, yang menyumbang 45% perekonomian. Kontribusi sektor ini sering cenderung meningkat sejak tahun 2020, tetapi masih tumbuh positif.

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) di Nusa

Tenggara Timur(NTT) Bertumpuh pada sektor-sektor utama seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Pada tahun 2021,tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Timor tengah Selatan (TTS) mencapai 17,30%, dengan jumlah penduduk miskin ekstrem 81.180 jiwa. Perekonomian TTS dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi akhir Rumah Tangga(PKRT), yang menyumbangkan 71,46% dari total perekonomian pada tahun 2021.dari total konsumsi akhir PKRT, PKLNPRRT dan PKP menyumbang 89,41% dari total PDRB, sementara PMTB yang merupakan investasi fisik, menyumbang 33,58%. Ini bisa menunjukkan bahwa intitusi ekonomi di TTS masih bersifat konsumtif.

Pada tahu 2022, Perekonomian Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), indonesia dipengaruhi oleh pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga (PKRT) yang mencapai 71,46%. Dari total konsumsi akhir PKRT, PKLNPRRT dan PKP, yaitu 7.877 milyar rupiah, berkontribusi 89,41% dari total PDRB. PMTB, yang mempengaruhi infestasi fisik, berkontribusi 33,58% dari total PDRB. PDRB ini bisa menunjukkan bahwa perilaku institusi ekonomi di TTS masih bersifat konsumtif. Sektor- sektor utama perekonomian kabupaten TTS masih bertumpu pada pertanian, perkebunan, dan peternakan. Sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang 45% perekonomian di TTS, dengan kontribusinya cenderung meningkat.

Pada tahun 2023, perekonomian kabupaten timor tengah selatan (TTS) di Nusa Tenggara Timur, di indonesia di pengaruhi oleh pengeluaran konsumsi akhir

Desentralisasi fiskal adalah proses distribusi anggaran dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Tujuannya adalah untuk mendukung fungsi pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan kewengana masing-masing bidang pemerintahan.

Desentralisasi fiskal dapat dilakukan dengan cara- cara berikut:

Pembagian sumber penerimaan untuk daerah yang dapat digali dan digunakan secara mandiri, pengaturan pajak lokal, pembagian pajak, bantuan khusus, tranfer horisoltal antara daerah sebagai instrumen pemerataan. Desentralisasi fiskal dapat mendorong pertumbuhan ekonomi karna pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran untuk barang publik lokal yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. ini karna pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi. Di indonesia, kebijakan desentralisasi fiskal dimulai pada tahun 2001 dengan tujuan untuk mendorong perekonomian daerah dan mengurangi ketimpangan pendapatan atara daerah.

Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi sangat penting bagi Pemerintahan Kabupaten/kota, Timor Tengah Sealatan dengan adanya Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan ekonomi Di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tabel 1.1

PDRB Kabupaten Timor Tengah Selatan Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan
Kerja Usaha (Miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA PDRB	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.838,05	1.911,43	1.976,33	2.047,38	2.049,20	2135.56	2235.34	2311.94
Pertambangan dan Penggalian	82,87	84,98	86,88	89,55	72,47	73.49	73.50	73.51
Industri Pengolahan	29,00	30,27	31,88	32,87	32,86	32.51	35.08	36.22
Pengadaan Listrik dan Gas	1,63	1,65	1,80	1,82	2,36	2.51	2.71	3.02
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	-	-	1,00	1,03	1,06	1.18	1.21	1.26
Konstruksi	330,78	356,50	385,93	412,21	369,60	394.60	395.52	429.72
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	286,59	299,66	320,87	342,57	321,65	333.18	355.95	376.04
Transportasi dan Pergudangan	67,45	70,16	74,18	76,04	75,42	77.55	79.23	81.18
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	3,38	4,11	4,40	4,52	4,10	4.19	4.34	4.51
Informasi dan Komunikasi	344,22	366,46	388,85	412,67	452,28	462.46	480.58	485.48
Jasa Keuangan dan Asuransi	124,91	132,88	135,56	139,35	154,86	159.80	160.76	162.37

Real Estate	124,25	130,28	136,75	136,85	135,34	138.02	141.05	145.47
Jasa Perusahaan	3,30	3,45	3,61	3,80	2,86	2.41	2.50	2.72
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	541,65	581,91	631,92	693,62	717,58	689.31	688.35	689.12
Jasa Pendidikan	323,74	242,61	253,75	267,72	272,11	267.30	267.97	277.80
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	61,58	62,20	65,13	87,68	70,59	76.27	77.05	79.05
Jasa Lainnya	40,21	40,90	41,76	42,15	34,82	33.52	33.60	35.21
Jumlah	4.113,98	4.320,34	4.540,62	4.771,99	4.769,17	4883.87	5035.91	5197.44

Sumber : BPS, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Data diatas dapat dianalisis bahwa jumlah keseluruhan Sektor Perekonomian di Kabupaten Timor Tengah Selatan sebanyak 17 Sektor atau Lapangan Usaha , terdiri dari berbagai jenis penghasilan agar dapat meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Tabel 1.2

DATA APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan

Dalam Bentuk miliaran Rupiah

TAHUN	PAD	TKDD
2016	1.299,43	1.206,40
2017	1.332,83	1.231,53
2018	1.409,38	1.222,34
2019	1.542,08	1.354,48
2020	1.626,36	1.430,00
2021	1.475,89	1.266,15
2022	1.621,24	1.453,15
2023	1.590,00	1.445,61

Sumber : PORTAL APBD Kabupaten TTS.

Data diatas dapat dianalisis bahwa APBD Kabupaten Timor Tengah Selatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari : Pajak daerah, Retribusi Daerah, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Dan juga, Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) terdiri dari: Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendaptan Transfer Antar Daerah.

Penelitian oleh Hadi Sasana (2009) dengan judul Analisis Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dikabupaten/ Kota Provinsi Jawa Tengah. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap laju pertumbuhan ekonomi didaerah kabupaten sedangkan Pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan dan

mempunyai hubungan yang negatif terhadap kesenjangan ekonomi antar daerah di kabupaten / kota Jawa Tengah.

Penelitian juga didahului oleh Zulkipli (2017) tentang Analisis pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan ekonomi di Indonesia..hasil penelitian menunjukkan bahwa Desentralisasi fiskal berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan Judul : **“Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Timor Tengah Selatan.”**

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Timor Tengah Selatan

1.3 Persoalan Penelitian

1. Persoalan dalam penelitian ini yaitu apakah desentralisasi fiskal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.4 Tujuan Dan Manfaat

a. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Timor Tengah Selatan

b. Manfaat Penelitian**a. Manfaat Akademik**

Memberikan manfaat bagi Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi berkaitan dengan Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

b. Manfaat Praktis

Memberikan Masukan bagi Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan berkaitan dengan pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di kabupaten Timor Tengah Selatan.